

MODEL MANAJEMEN KOLABORATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA MABURAI KABUPATEN TABALONG

Muhammad Sunaryo¹, Erfan Maulana²

^{1,2}Universitas Sapta Mandiri

Email Korespodensi: muhsunaryo@univsm.ac.id

Email: erfanmaulana@univsm.ac.id

ABSTRACT

The administration of village governance in the era of regional autonomy requires governance practices that are participatory, transparent, and collaborative. The collaborative management model is considered an approach capable of enhancing the effectiveness of village governance through the involvement of various stakeholders. This study aims to analyze the implementation of the collaborative management model in village governance in Maburai Village, Tabalong Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research employs a qualitative approach with a descriptive method using observation, in-depth interviews, and documentation studies as data collection techniques. The findings indicate that the collaborative management model has been implemented through village deliberation forums, the involvement of the Village Consultative Body (BPD), village community institutions, and community participation in the planning and implementation of village development. However, several challenges remain, including limited capacity of village officials, suboptimal inter-institutional coordination, and uneven community participation. Strengthening village institutional capacity, enhancing collaborative communication, and utilizing information technology are essential strategies to improve the effectiveness of village governance administration.

Keywords: Collaborative management, Village governance, Participation.

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada era otonomi daerah menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan kolaboratif. Model manajemen kolaboratif menjadi pendekatan yang dinilai mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model manajemen kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Maburai Kabupaten Tabalong, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model manajemen kolaboratif telah diterapkan melalui forum musyawarah desa, pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur desa, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan komunikasi kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci: Manajemen kolaboratif, Pemerintahan desa, Partisipasi.

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal. Posisi desa semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan berbasis hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Regulasi ini menempatkan desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dukungan fiskal melalui kebijakan Dana Desa yang digelontorkan sejak tahun 2015 semakin mempertegas peran strategis desa dalam pembangunan nasional. (Republik Indonesia, 2014)

Namun, besarnya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki desa juga menghadirkan tantangan dalam aspek tata kelola. Pengelolaan pemerintahan desa dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dwiyanto (2017) menegaskan bahwa kualitas tata kelola publik sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat hanya bertumpu pada kepala desa dan perangkatnya, tetapi membutuhkan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, serta masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. (Dwiyanto, 2017)

Dalam konteks tersebut, pendekatan manajemen kolaboratif atau *collaborative governance* menjadi relevan untuk menjawab kompleksitas pembangunan desa. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif melalui forum formal yang berorientasi pada konsensus. Lebih lanjut, Emerson dan Nabatchi (2015) menjelaskan bahwa efektivitas kolaborasi ditentukan oleh dinamika keterlibatan, motivasi bersama (*shared motivation*), serta kapasitas aksi kolektif (*capacity for joint action*). Artinya, kolaborasi bukan sekadar pelibatan simbolik, melainkan proses dialog yang dilandasi kepercayaan, komitmen, dan tujuan bersama. (Ansell & Gash, 2008)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas tata kelola desa. Studi Astuti (2019) mengenai pengelolaan BUMDes menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan mitra eksternal berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian ekonomi desa. Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan koordinasi kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan desa (Khadlirin, 2021). Di sisi lain, beberapa studi menemukan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur desa dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama dalam implementasi tata kelola kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015).

Meskipun penelitian mengenai *collaborative governance* telah pernah dilakukan, kajian yang secara spesifik menganalisis model manajemen kolaboratif dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Tabalong masih terbatas. Desa Maburai sebagai salah satu desa yang menerapkan prinsip partisipatif melalui forum musyawarah desa dan pelibatan BPD menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam praktiknya, masih ditemukan tantangan berupa koordinasi antar lembaga yang belum optimal serta variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model manajemen kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Maburai Kabupaten Tabalong serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan model *collaborative governance* pada level pemerintahan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan kolaboratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami dinamika penerapan model manajemen kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Maburai Kabupaten Tabalong. Pendekatan kualitatif dipilih karena berorientasi pada eksplorasi makna,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

181

Indexed



SINTA 4



proses, dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola pemerintahan desa. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami makna dari suatu fenomena sosial, sedangkan Yin (2018) menegaskan bahwa studi kasus kualitatif tepat digunakan untuk mengkaji fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam. (Creswell, 2014; Yin, 2018). Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena Desa Maburai telah menerapkan prinsip partisipatif melalui forum musyawarah desa. Informan ditentukan menggunakan purposive sampling yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat. Menurut Patton (2015), pemilihan informan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kedalaman informasi yang dapat diberikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan notulen musyawarah desa. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode (Miles et al., 2014). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Maulana & Berkatillah, 2025). Data dikategorikan berdasarkan indikator *collaborative governance*, seperti dialog, kepercayaan, komitmen bersama, dan kapasitas aksi kolektif. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai model manajemen kolaboratif serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

PEMBAHASAN

Implementasi Model Manajemen Kolaboratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model manajemen kolaboratif di Desa Maburai terwujud melalui mekanisme musyawarah desa sebagai forum utama pengambilan keputusan pembangunan. Musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi menjadi ruang deliberatif yang mempertemukan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya dalam menentukan prioritas program pembangunan. Dalam beberapa forum yang diamati, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan secara terbuka, terutama terkait pembangunan infrastruktur lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Temuan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008), bahwa kolaborasi yang efektif ditandai dengan adanya forum dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan pencapaian konsensus. Di Desa Maburai, proses musyawarah desa menjadi arena interaksi yang relatif inklusif, meskipun masih terdapat dominasi aktor tertentu dalam penyampaian pendapat. (Emerson & Nabatchi, 2015) juga menekankan pentingnya *shared motivation* dalam kolaborasi, yang tercermin dari adanya komitmen bersama antara pemerintah desa dan BPD untuk menyelaraskan program pembangunan dengan aspirasi masyarakat.

Secara empiris, beberapa keputusan pembangunan yang dihasilkan dari musyawarah desa menunjukkan adanya integrasi antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah desa. Hal ini mengindikasikan bahwa model manajemen kolaboratif telah berkontribusi terhadap peningkatan responsivitas kebijakan desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Astuti, 2019) yang menyatakan bahwa kolaborasi antar aktor desa dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Dinamika Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Dinamika kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat di Desa Maburai menunjukkan pola komunikasi dua arah yang relatif terbuka. BPD menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, sementara pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam beberapa kasus, BPD secara aktif menyampaikan aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun melalui komunikasi informal di tingkat RT atau dusun.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

182

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan intensitas komunikasi antar lembaga. Aparatur desa dengan pemahaman administrasi dan regulasi yang lebih baik cenderung lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas yang dapat mempengaruhi kualitas deliberasi. (Emerson & Nabatchi, 2015) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh *capacity for joint action*, yaitu kemampuan kelembagaan, sumber daya, dan kepemimpinan dalam mengelola proses kolaboratif.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antar lembaga belum sepenuhnya terstruktur, terutama dalam tahap evaluasi program. Koordinasi lebih intens terjadi pada tahap perencanaan dibandingkan tahap monitoring dan evaluasi. Hal ini memperlihatkan bahwa model kolaboratif masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh siklus kebijakan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Khadlirin, 2021) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antar aktor desa menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi tata kelola pembangunan desa.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi manajemen kolaboratif di Desa Maburai. Pertama, budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat menjadi modal sosial penting dalam mendukung kolaborasi. Modal sosial ini memperkuat rasa saling percaya (*trust*) antar warga dan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dalam perspektif teori kolaboratif, kepercayaan merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya komitmen bersama (Ansell & Gash, 2008).

Kedua, dukungan regulasi melalui Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan musyawarah desa dan partisipasi masyarakat. Ketiga, adanya komitmen kepala desa dalam melibatkan masyarakat menjadi faktor kepemimpinan fasilitatif yang memperkuat proses kolaboratif. (Ansell & Gash, 2008) menyebut kepemimpinan fasilitatif sebagai elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam aspek perencanaan berbasis data dan evaluasi program. Selain itu, partisipasi masyarakat belum merata; sebagian warga aktif terlibat, sementara lainnya cenderung pasif dan hanya hadir sebagai formalitas. Variasi tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi belum sepenuhnya substantif. (Dwiyanto, 2017) menyatakan bahwa partisipasi yang bersifat simbolik dapat mengurangi efektivitas tata kelola publik karena tidak menghasilkan kontrol sosial yang optimal.

Koordinasi kelembagaan yang belum terstruktur secara sistematis juga menjadi tantangan tersendiri. Mekanisme komunikasi antar lembaga masih bergantung pada inisiatif personal, bukan pada sistem yang terdokumentasi secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa model manajemen kolaboratif di Desa Maburai masih berada pada tahap berkembang (*developing stage*), di mana praktik kolaborasi telah berjalan tetapi belum sepenuhnya terlembagakan secara kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen kolaboratif di Desa Maburai telah berjalan melalui forum musyawarah desa dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas partisipasi, dan sistem koordinasi antar lembaga. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan *collaborative governance* di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh adanya forum partisipatif, tetapi juga oleh kualitas interaksi, kapasitas sumber daya, dan kepemimpinan fasilitatif yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model manajemen kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Maburai Kabupaten Tabalong telah diimplementasikan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Forum musyawarah desa berperan sebagai ruang dialog yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi dua

arah, penyampaian aspirasi masyarakat, serta pengambilan keputusan secara partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Implementasi model kolaboratif ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan masyarakat dan kontribusi terhadap peningkatan responsivitas kebijakan desa terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, efektivitas model manajemen kolaboratif masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan kapasitas aparatur desa, belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar lembaga desa yang belum sepenuhnya terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun praktik kolaboratif telah berjalan, penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi masih diperlukan agar kolaborasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan manajemen kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum partisipatif, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kapasitas sumber daya manusia, serta kepemimpinan fasilitatif dalam mengelola proses kolaborasi.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan perencanaan dan pengelolaan pemerintahan berbasis partisipatif, penguatan peran forum musyawarah desa sebagai ruang kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, komunikasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat model manajemen kolaboratif sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, S. J. W. (2019). Building Independent Villages through Collaborative Governance: A Study of Village-Owned Enterprises (BUMDes). *Proceedings of the Indonesian Association for Public Administration*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Khadlirin. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Solusi*.
- Maulana, E., & Berkatillah, A. (2025). Social Inequality and Inequal Access to Jobs (A Case Study of Street Buskers and Clowns in Hulu Sungai Utara Regency). *Jurnal Ilmiah Publika (JIP)*, 13(2), 122–129. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.